



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 2 Agustus 2024

The seal is circular with the text "BUPATI NGAWI" around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink over a circular stamp.
BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

The seal is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI" around the perimeter and "SETDA" in the center. A signature in blue ink is written over the seal.
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 91



RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

Disusun oleh :

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-NYA, sehingga pada akhirnya dapat tersusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, misi dan visi program prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Diawali dengan perencanaan yang matang maka pada akhirnya sangat diharapkan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang direncanakan, sehingga antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan dapat sinkron dan berjalan dengan baik dan benar.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini masih jauh dari sempurna baik dari segi

substansi maupun redaksinya, sehingga Kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang bertujuan untuk penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di masa mendatang.

Pada akhirnya, besar harapan Kami mudah-mudahan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini dapat terlaksana dan bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngawi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 LandasanHukum.....	4
1.3 Maksud danTujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	52
2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	53
2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat.....	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	80
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah...	81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	86
BAB V PENUTUP.....	120
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.....	120
b. Rencana Tindak Lanjut	121

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

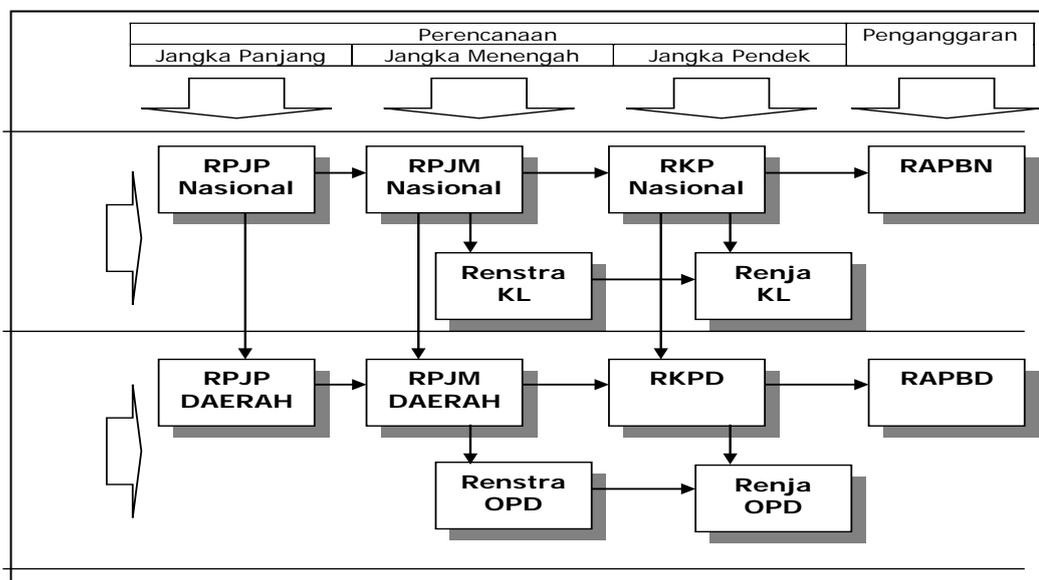
1.1. Latar Belakang

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib untuk disusun oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RKPD adalah sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, merinci kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur, dan pendanaannya sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Alur sistem perencanaan pembangunan daerah menggambarkan hubungan antar dokumen perencanaan sebagai langkah untuk mencapai kualitas RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perubahan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD 2025 yang sudah tertuang dalam RKPD Kabupaten Ngawi dan Rentra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2016 – 2021 yang dijelaskan dengan diagram alir sebagai berikut:



Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Proses Penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut ;

a. Persiapan penyusunan kegiatan pada tahap ini terdiri dari;

1. Pembentukan tim penyusun Renja PD

Anggota tim penyusun Renja PD adalah pejabat dan staf PD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja PD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

2. Orientasi mengenai Renja PD

Orientasi mengenai Renja PD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja PD, hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja PD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja PD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja PD.

4. Penyiapan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi PD

- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
- c. Penyusunan Rancangan Renja;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja; dan
- f. Penetapan Renja dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Berkaitan hal tersebut acuan dalam penyusunan rencana kerja 2025 adalah :

1. RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025;

3. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimaslisasi pencapaian Target Kinerja;
4. Pedoman penyusunan Renja PD Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka pengembangan otonomi daerah khususnya dalam pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diberi kewenangan penuh dalam mengelola manajemen Komunikasi dan Informatika dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi ;
2. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 29. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 225);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 35. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana

terlah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Proinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);

55. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25);
56. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 75 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 75);
57. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Mewujudkan manajemen Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang handal, profesional dan akuntabel serta mampu bersaing dalam era globalisasi dan informasi;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

4. Sebagai bahan acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari ;

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU

Bab II Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian renstra OPD, capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yg sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM ,maupun terhadap IKK, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD serta review terhadap rancangan awal RKPD, terdiri dari ;

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian renstra PD

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun – tahun sebelumnya.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.
3. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya,

terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai ;

- a. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs(Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
- e. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai ;

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
- c. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkair langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten Ngawi yang lain langsung ditujukan kepada PD bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bab III menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tuas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bab IV menjelaskan tentang faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Seluruh PD diharapkan dapat melaksanakan penyusunan Renja PD sesuai dengan tahapan dan sistematika yang telah disampaikan pada Pedoman ini

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN
LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur terkait pembangunan jaringan Fiber Optik dalam rangka menunjang kelancaran ketersediaan jaringan Informasi teknologi di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK dan layanan publik.

- Pembangunan infrastruktur Fiber Optic di 27 PD
- Pembangunan Data Center
- Pembangunan Mini Command Center
- Pengadaan Bandwidth untuk kecukupan seluruh PD dan Kecamatan
- Penyusunan Dashboard eksekutif dalam rangka persiapan penyusunan Data Statistik Sektoral Satu Data Indonesia
- Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan
- Peningkatan pengelolaan layanan publik sesuai standart.
- Penerapkan manajemen SPBE secara efisien, efektif dan berkesinambungan dengan langkah mempercepat implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi ; integrasi perencanaan, penganggaran,

pengadaan, integrasi data kepegawaian, integrasi data kearsipan, integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat data nasional untuk meningkatkan nilai SPBE 2,98 agar menjadi lebih baik lagi.

- Memberikan pelayanan dan informasi berbasis android
- Pengadaan Bandwidth pasar untuk aplikasi e – retribusi untuk pasar di Kabupaten Ngawi.
- Fasilitasi video conference untuk pimpinan daerah dan PD.
- Fasilitasi internet gratis di ruang publik.
- Berbagai program acara di Radio Suara Ngawi dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah daerah diberbagai sektor yaitu pendidikan, kesehatan, perekonomian. Beberapa program yang diselenggarakan seperti Talk show, Dialog Interaktif, UBLIK (Umyek Bareng Lintas Komunitas), NGEMPER (Ngejam Perempatan Kartonyono) INSPIRASI dan masih banyak yang lain.

Berikut adalah capaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Target kinerja atas indikator persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kerjanya 100%

d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat

waktu adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target kinerja atas persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja atas persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja atas persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Target kinerja atas indikator persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi adalah 75 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 133%.

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 80 %, realisasinya sebesar 97% sehingga capaian kinerjanya 122%.

Target kinerja atas indikator persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik adalah 77 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 130%.

Target kinerja atas indikator persentase Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan adalah 85 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 118%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Target kinerja atas indikator persentase Layanan E-Government Yang Terintegrasi adalah 80 %, realisasinya sebesar 86% sehingga capaian kinerjanya 107%.

a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo adalah 85 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 118%.

Target kinerja atas indikator persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah 85 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 118%.

b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik adalah 85 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 118%.

Target kinerja atas indikator persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah adalah 85 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 118%.

Target kinerja atas indikator persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan adalah 85 %, realisasinya sebesar 85% sehingga capaian kinerjanya 100%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Target kinerja atas indikator persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral adalah 60 %, realisasinya sebesar 122% sehingga capaian kerjanya 204%.

Target kinerja atas indikator persentase kelengkapan metadata indikator sektoral adalah 60 %, realisasinya sebesar 0% sehingga capaian kerjanya 0%.

Target kinerja atas indikator persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS adalah 60 %, realisasinya sebesar 68% sehingga capaian kerjanya 113%.

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Target kinerja atas indikator persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah adalah 80 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kerjanya 125%.

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard adalah 60 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kerjanya 167%.

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan adalah 80 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kerjanya 125%.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN s/d Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
1	2	3	4				5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	16	01	2.01	01	URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA	100%	100	%	100	%	100	100%	100%	100%		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	100	%	100	%	100	100%	100%	100%	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	100	%	100	%	100	100%	100%	100%	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100	11 Dokumen	100%
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1 Dokumen	100%
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	dok	1	Dokumen	1	Dokumen		1 Dokumen	100%
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	dok	2	Dokumen	2	Dokumen		2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6,00	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang disusun	1.430 Orang/bulan	26	Dokumen	26	Dokumen	26	Dokumen	100%	1.430 Orang/bulan	1.430 Orang/bulan	100%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 dok	1.561	Orang/bln	1430	Orang/bln	1430	Orang/bln	100%	26 dok	26 dok	100%
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	50 laporan	48	laporan	50	Laporan	50	Laporan	100%	50 laporan	50 laporan	100%
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	16	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket			1	Paket	1	Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	57 orang	57	orang	57	orang	57	orang	100%	57 orang	57 orang	100%
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	100	%	1	Paket	1	Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	100	%	1	Paket	1	Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	390	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
						Jumlah makanan yang disediakan		44	kotak	730	Kotak	730	Kotak	100%	-	-	
						Jumlah minuman yang disediakan		-	botol/dos	50	Botol/Dos	50	Botol/Dos	100%	-	-	
						Jumlah air isi ulang yang disediakan		0	galon	50	Galon	50	Galon	100%	-	-	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.925	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
						Jumlah Barang yang digandakan	12000 lembar	9.109	lembar	12500	Lembar	12500	Lembar	100%	12000 lembar	12000 lembar	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	12	surat kabar	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	24 dokumen	24 dokumen	100%
2	16	01	2.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
						Jumlah Mamin Tamu yang disediakan	60 kotak	-	-	50	Kotak	50	Kotak	100%	60 kotak	60 kotak	100%
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	40	kali	90	Laporan	90	Laporan	100%	90 laporan	90 laporan	100%
						Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	150 kotak	35	kali	495	Kotak	495	Kotak	100%	150 kotak	150 kotak	100%
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	-	1	Unit	1	Unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	-	-	5	Unit	5	Unit	100%	3 unit	3 unit	100%
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	2	unit	10	Unit	10	Unit	100%	10 unit	10 unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2unit	1	Unit	8	Unit	8	Unit	100%	2unit	2unit	100%
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1	Unit	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	50	surat	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	24	rekening	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
						Jumlah Pemesangan Daya Listrik	-	72	rekening	0	Titik	0	Titik	100%	-	-	-
						Jumlah Penambahan daya Listrik	-	24	rekening	0	KWH	jjm	KWH	100%	-	-	-
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	192	buah	48	Laporan	48	Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	84	kali	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	100	%	100	%	100%	100%	100%	100%		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1unit	2	kali	1	Unit	1	Unit	100%	1unit	1unit	100%
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4unit	4	kali	4	Unit	4	Unit	100%	4unit	4unit	100%
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4unit	4	unit	16	Kali	16	Kali	100%	16 Kali	16 Kali	100%
2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 unit	-					100%	36 unit	36 unit	100%	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	71	kali	36	Unit	36	Unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	35	m2	2	Unit	1	Unit	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	75%	-	-	75	%	75	%	100%	75%	75%	100%
2	16	02	2.10		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	85%	-	-	80	%	80	%	100%	85%	85%	100%
						Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	79%	-	-	77	%	77	%	100%	79%	79%	100%
						Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	90%	-	-	85	%	85	%	100%	90%	90%	100%
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 dokumen	-	-	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	4 kali	4	kali	1	kali	1	kali	100%	4 kali	4 kali	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
						Jumlah monev admin SP4N-Lapor!	-	-	-	2	Kali	2	Kali	100%		100%		
						Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	90 aduan	80	aduan	55	aduan	55	aduan	100%	90 aduan	90 aduan	100%	
						Jumlah peserta monev admin SP4N-LAPOR!	48 orang	-	-	60	orang	60	orang	100%	48 orang	48 orang	100%	
						Jumlah Peserta sosialisasi kanal SP4N-Lapor! di tingkat Desa dan Kecamatan	250 orang	180	orang	100	orang	100	orang	100%	250 orang	250 orang	100%	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	4 laporan	4	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%	
						Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	
						Jumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang terpublikasi	70 agenda	-	-	-	-	-	-	-	70 agenda	70 agenda	100%	
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%	
2	16	02	2.10	04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	-	-	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	15 konten	-	-	10	konten	10	konten	100%	15 konten	15 konten	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
						Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	50 orang	-	-	50	orang	50	orang	100%	50 orang	50 orang	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4 laporan	-	-	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2	16	02	2.10	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	-	-	1	Dokumen		1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	6 komunitas	50	komunitas	50,00	6 Komunitas	50,00	6 Komunitas	100%	6 komunitas	6 komunitas	100%
						Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	5 kali	5	kali	5,00	5 Kali	5,00	5 Kali	100%	5 kali	5 kali	100%
						Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10 media	55	media	55,00	10 Media	55,00	10 Media	100%	10 media	10 media	100%
						Jumlah peralatan studio yang diadakan	4 unit	4	unit	4,00	4 Unit	4,00	4 Unit	100%	4 unit	4 unit	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4 laporan	4	laporan	4,00	4 Laporan	4,00	4 Laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2	16	02	2.10	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen			1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	4diseminasi	0	diseminasi	4	diseminasi	4	diseminasi	100%	4diseminasi	4diseminasi	100%	
					Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	4 daftar	4	daftar	4	daftar	4	daftar	100%	4 daftar	4 daftar	100%	
					Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	4 daftar	4	daftar	4	daftar	4	daftar	100%	4 daftar	4 daftar	100%	
					Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	4 daftar	4	daftar	4	daftar	4	daftar	100%	4 daftar	4 daftar	100%	
					Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD,Kecamatan dan Desa	150 orang	150	orang	150	orang	150	orang	100%	150 orang	150 orang	100%	
					Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	100%	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	100%	100%	100%	
					Jumlah pengaduan darurat yang ditindaklanjuti	12 laporan			10	aduan	10	aduan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	
2	16	02	2.10	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 layanan			10	layanan	10	layanan	100%	10 layanan	10 layanan	100%
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10 laporan			10	laporan	10	laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%	
					Jumlah produk penyebaran informasi bakohumas				38	produk	38	produk	100%	38 produk	38 produk	100%	
2	16	02	2.10	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen			1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	6 kegiatan	0	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	
					Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	150 orang	150	orang	150	orang	150	orang	100%	150 orang	150 orang	100%	
					Jumlah koordinasi terkait dengan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	
2	16	02	2.10	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen			1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis	120 orang			120	orang	120	orang	100%	120 orang	120 orang	100%	
					Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4 media komunikasi			4	media komunikasi	4	media komunikasi	100%	4 media komunikasi	4 media komunikasi	100%	
					Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4 laporan			4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%	
2	16	02	2.10	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	5 orang	20	iklan	20,00	100 orang	20,00	100 orang	100%	5 orang	5 orang	100%
					Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	30 iklan	100	orang	25	iklan	25	iklan	100%	30 iklan	30 iklan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
																Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik	100 orang	8	unit	100	orang	100	orang	100%	100 orang	100 orang	100%
						Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	12 unit	4	laporan	10	unit	10	unit	100%	12 unit	12 unit	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4 laporan			4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2	16	02	2.10	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 dokumen			1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	4 laporan			4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
						Jumlah peserta bimtek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola	50 orang			50	orang	50	orang	100%	50 orang	50 orang	100%
						Jumlah sarana prasarana alat kelengkapan maupun pendukung terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 unit				0 unit		0 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
2	16	02	2.10	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	5	media	3	dokumen	3	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik	5 media	50	media	5	media	5	media	100%	5 media	5 media	100%
						Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak	50 media	50	media	50	media	50	media	100%	50 media	50 media	100%
						Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah	38 media	100	orang	38	media	38	media	100%	38 media	38 media	100%
						Jumlah peserta Bimtek jurnalistik	100 orang	3	unit	100	orang	100	orang	100%	100 orang	100 orang	100%
						Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan	3 unit	50	laporan	3	unit	3	unit	100%	3 unit	3 unit	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media	50 laporan			50	laporan	50	laporan	100%	50 laporan	50 laporan	100%
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan E-Government Yang Terintegrasi	85%			80	%	80	%	100%	85%	85%	100%
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90%	85	%	85	%	85	%	100%	90%	90%	100%
						Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	90%	85	%	85	%	85	%	100%	90%	90%	100%
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah	4 laporan	0	situs	3	laporan	3	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	259 Domain	3	laporan	3	dokumen	3	dokumen	100%	259 Domain	259 Domain	100%
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen			3	dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
						Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	95	0	kegiatan	45	kegiatan	45	kegiatan	100%	95	95	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah daerah	4 laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27 unit			27	unit	27	unit	100%	27 unit	27 unit	100%
						Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46 OPD	46	OPD	46	OPD	46	OPD	100%	46 OPD	46 OPD	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	46 OPD	46	OPD	46	OPD	46	OPD	100%	46 OPD	46 OPD	100%
						Besaran bandwidth yang disediakan	2,5 giga	2	giga	2	giga	2	giga	100%	2,5 giga	2,5 giga	100%
						Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	53 kali	53	kali	53	kali	53	kali	100%	53 kali	53 kali	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK	10 laporan	10	laporan	10	laporan	10	laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	90%	85	%	85	%	85	%	100%	90%	90%	100%
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	90%	85	%	85	%	85	%	100%	90%	90%	100%
						Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi	90%	85	%	85	%	85	%	100%	90%	90%	100%
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	5	peraturan	1	dokumen	1	dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	3.3	0	indeks	0		0			3.3	3.3	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e-government	6 laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Oemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK	14 aspek	0	aspek	14	aspek	14	aspek	100%	14 aspek	14 aspek	100%	
					Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE	6 laporan	6	laporan	6	laporan	6	laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit			1	Unit	1	Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
					Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	7 OPD	0	OPD	7	OPD	7	OPD	100%	7 OPD	7 OPD	100%	
					Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	7 OPD	20	OPD	7	OPD	7	OPD	100%	7 OPD	7 OPD	100%	
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5 laporan	5	laporan	5	laporan	5	laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%	
					Jumlah sarana dan prasarana data center yang diadakan		1	unit	3	unit	3	unit	100%	3 unit	3 unit	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen			22	jenis data	22	jenis data	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Jumlah Fasilitasi sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo(berbasis ,vidio,teks,data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	60 fasilitasi			4	sistem elektronik	4	sistem elektronik	100%	60 fasilitasi	60 fasilitasi	100%
						jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintah daerah	5 laporan			4	laporan	4	laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 dokumen			22	Unit	22	Unit	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	16	03	2.02	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 PD			46	OPD	46	OPD	100%	46 PD	46 PD	100%
						Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22 jenis data	0	jenis data	22	jenis data	22	jenis data	100%	22 jenis data	22 jenis data	100%
						Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	4 sistem elektronik	4	sistem elektronik	4	sistem elektronik	4	sistem elektronik	100%	4 sistem elektronik	4 sistem elektronik	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	4 laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2	16	03	2.02	08	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	22 Unit	-	-	22	Unit	22	Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%
						Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang	13 OPD	0	OPD	13	OPD	13	OPD	100%	13 OPD	13 OPD	100%
						Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22 sistem	0	sistem	22	sistem	22	sistem	100%	22 sistem	22 sistem	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis	4 laporan	3	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2	16	03	2.02	09	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 layanan	-	-	9	layanan	9	layanan	100%	9 layanan	9 layanan	100%
						Jumlah aplikasi yang terintegrasi	4 aplikasi	0	aplikasi	4	aplikasi	4	aplikasi	100%	4 aplikasi	4 aplikasi	100%
						Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan	0	layanan	9	layanan	9	layanan	100%	9 layanan	9 layanan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	14 layanan	0	layanan	14	layanan	14	layanan	100%	14 layanan	14 layanan	100%	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan	3 laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 dokumen	-	-		1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	2 capaian	0	capaian	0	2 capaian	0	2 capaian	100%	2 capaian	2 capaian	100%	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	6 laporan	6	laporan	6,00	6 laporan	6,00	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	-	-	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	20 orang	0	orang	15	orang	15	orang	100%	20 orang	20 orang	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	250 orang	100	orang	200	orang	200	orang	100%	250 orang	250 orang	100%
						Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	250 orang	100	orang	200	orang	200	orang	100%	250 orang	250 orang	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3 laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	1 dokumen	-	-	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	4 kali	4	kali	4	kali	4	kali	100%	4 kali	4 kali	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
					PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												100%
2	20				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%			100	%	100	%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	50%	25	%	25	%	25	%	100%	50%	50%	100%
						Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	50%	25	%	25	%	25	%	100%	50%	50%	100%
						Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	50%	25	%	25	%	25	%	100%	50%	50%	100%
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	0	buku	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik		50	buku	1	Laporan	1	Laporan	100%			100%
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu	26 orang	0	buku	46	Orang	46	Orang	100%	26 orang	26 orang	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi Peningkatan kapasitas SDM Pemda	2 laporan	1	laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
2	20	02	2.01	03	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas SDM Pemda	2 laporan	-	-	-	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	46 orang	-	-	46	Orang	46	Orang	100%	46 orang	46 orang	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan	-	-	-	9	Laporan	9	Laporan	100%			100%
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	-	-	3	Unit	3	Unit	100%	1 unit	1 unit	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan infrastruktur	1 laporan	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	kompilasi	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	1 laporan	0	survey	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											100%
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	85%	80	%	80	%	80	%	100%	85%	85%	100%
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard	85%	80	%	80	%	80	%	100%	85%	85%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	2 laporan	-	-	2	laporan	2	laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
2	21	02	2.01	06	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	20	kegiatan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
						Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	3 orang	0	system elektronik	100	orang	100	orang	100%	3 orang	3 orang	100%
						Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 orang	0	sistem elektronik	3	orang	3	orang	100%	100 orang	100 orang	100%
						Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	4	laporan	4	unit	4	unit	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	21	02			Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3 orang						3 orang	3 orang	100%	
					Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 unit						4 unit	4 unit	100%	
			2.01		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	-	-	1	laporan	1	laporan	100%	1 Laporan
					Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	20	-	-	-	-	-	-	20	20	100%
					Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	108	-	-	-	-	-	-	108	108	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	38	-	-	1	laporan	1	laporan	100%	38	38	100%
						Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
						Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	2	layanan	2	layanan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	21	02	2.01		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 OPD	-	-	6	OPD	6	OPD	100%	6 OPD	6 OPD	100%
						Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	2 layanan	-	-	2	layanan	2	layanan	100%	2 layanan	2 layanan	100%
						Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1 CSIRT	-	-	1	CSIRT	1	CSIRT	100%	1 CSIRT	1 CSIRT	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan	-	-	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prpgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	85%	-	-	-	-	-	85%	85%	100%	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 OPD	1	CSIRT	1	6 OPD	1	6 OPD	100%	6 OPD	100%
						Jumlah Layanan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan	4	laporan	1	layanan	1	layanan	100%	1 layanan	100%
						Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit			8	unit	8	unit	100%	8 unit	100%
						Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi	8 unit			8	unit	8	unit	100%	8 unit	100%
						Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan			4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	100%

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Triwulan I Periode Pelaksanaan Tahun 2024

No	Kode				Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100			
1	2				3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16	17
	0	0	0		NON URUSAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0	0	0		NON URUSAN																			
1	0	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
	0	0	0	1	2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	0	0	0	1	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,00	Dokumen 1.720.000	0	0	11,00	1.720.000	4,00	0	4,00	0	36,36	0	4,00	0	36,36	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	02 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen 1.215.000	0	0	1,00	1.215.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1,00	Dokumen 1.215.000	0	0	1,00	1.215.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	04 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00	Dokumen 2.240.000	0	0	2,00	2.240.000	1,00	1.120.000	1,00	1.120.000	50,00	50	1,00	1.120.000	50	50,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	2,00	Dokumen 2.240.000	0	0	2,00	2.240.000	1,00	0	1,00	0	50,00	0	1,00	0	50	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,00	Laporan 3.368.000	0	0	6,00	3.368.000	2,00	0	2,00	0	33,33	0	2,00	0	33,33	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
	0	0	0	1	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26,00	Dokumen 6.041.734.553	0	0	26,00	6.041.734.553	6,00	1.082.059.261	6,00	1.082.059.261	23,08	18	6,00	1.082.059.261	23,08	17,91	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.430,0	Orang/Bulan 6.041.734.553	0	0	1.430,0	0	330,00	0	330,0	0	23,08	0	330,00	0	23,08	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1,00	Laporan 2.780.000	0	0	1,00	2.780.000	0	1.390.000	0	1.390.000	0,00	50	0	1.390.000	0	50,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	0	1	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1,00	Laporan 4.980.000	0	0	1,00	4.980.000	0	1.245.000	0	1.245.000	0,00	25	0	1.245.000	0	25,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
														I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100						
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
1	2					3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16	17			
	0	0	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
	0	0	1	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00	Paket	38.882.000	0		0	1,00	38.882.000	0	12.575.000	0	12.575.000	0,00	32	0	12.575.000	0	32,34	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,00	Orang	150.000.000	0		0	50,00	150.000.000	50,00	149.640.000	50,00	149.640.000	100,00	100	50,00	149.640.000	100	99,76	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	0	0	1	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	3.144.000	0		0	1,00	3.144.000	1,00	3.144.000	1,00	3.144.000	100,00	100	1,00	3.144.000	100	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	54.183.440	0		0	1,00	54.183.440	1,00	53.284.880	1,00	53.284.880	100,00	98	1,00	53.284.880	100	98,34	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1.992.000	0		0	1,00	1.992.000	0	996	0	996	0,00	50	0	996.000	0	50,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
							Jumlah air isi ulang yang disediakan	0	Galon	1.992.000	0		0	0		0				0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
							Jumlah makanan yang disediakan	0	Kotak	1.992.000	0		0	0		0				0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
							Jumlah minuman yang disediakan	0	Botol/Dos	1.992.000	0		0	0		0				0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	8.774.000	0		0	1,00	8.774.000	0	4.387.000	0	4.387.000	0,00	50	0	4.387.000	0	50,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
							Jumlah barang yang digandakan	12	Lembar	8.774.000	0		12		6		6			50,00		6		50		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24,00	Dokumen	1.980.000	0		0	24,00	1.980.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	1	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00	Paket	1.300.000	0		0	1,00	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
							Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	60,00	Kotak	1.300.000	0		60,00		0		0			0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	0	0	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,00	Laporan	103.077.286	0	Rp	0		90,00	103.077.286	20,00	16.010.000	20,00	16.010.000	22,22	16	20,00	16.010.000	22,22	15,53	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
						Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	0	Kotak	103.077.286	0		0		0		0		0,00	0	0		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
	0	0	1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1,00	Unit	472.468.000	0		0		1,00	472.468.000	1,00	469.500.000	1,00	469.500.000	100,00	99	1,00	469.500.000	100	99,37	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00	Unit	29.500.000	0		0		1,00	29.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10,00	Unit	28.887.000	0		0		10,00	28.887.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00	Laporan	246.036.380	0		0		1,00	246.036.380	1,00	62.673.428	1,00	62.673.428	100,00	25	1,00	62.673.428	100	25,47	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
						Jumlah penambahan daya listrik	0	Unit	246.036.380	0		0		0		0		0,00	0	0		0		0		0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah pemasangan daya listrik	0	Unit	246.036.380	0		0		0		0		0,00	0	0		0		0		0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	0	Unit	246.036.380	0		0		0		0		0,00	0	0		0		0		0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	Laporan	64.800.000	0		0		1,00	64.800.000	1,00	10.800.000	1,00	10.800.000	100,00	17	1,00	10.800.000	100	16,67	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	Laporan	77.440.000	0		0		1,00	77.440.000	1,00	19.205.000	1,00	19.205.000	100,00	25	1,00	19.205.000	100	24,80	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	0	0	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajak dan	4,00	Unit	16.500.000	0		0		4,00	16.500.000	0	7.988.300	0	7.988.300	0,00	48	0	7.988.300	0	48,41	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2				3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16	17		
					Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0	Kali	16.500.000	Rp	0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	0	0	1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15,00	Unit	19.080.000	Rp	0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	Unit	40.000.000	Rp	0		2,00	19.953.000	Rp	2,00	19.953.000	100,00	50	2,00	19.953.000	100	49,88		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	0	0	1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	155.000.000	Rp	0		1,00	39.892.000	Rp	1,00	39.892.000	100,00	26	1,00	39.892.000	100	25,74		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																30,46	48,85			30,46	48,85					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					
2	2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																					
2	16	2	2.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																					
2	16	2	02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	50,00	aduan	36.250.000	Rp	0		50,00	36.250.000	Rp	10,00	6.284.000	20,00	17	10,00	6.284.000	20	17,34		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan	60,00	orang	36.250.000	Rp	0		60,00		Rp	0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta monev admin SP4N-LAPOR!	0	Orang	36.250.000	Rp	0		0		Rp	0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	1,00	laporan	36.250.000	Rp	0		1,00		Rp	0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100				
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1																									
	2	16	2	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	15,00	konten	20.248.000	0	0	15,00	20.248.000	5,00	2.730.000	5,00	2.730.000	33,33	13	5,00	2.730.000	33,33	13,48	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	0	orang	20.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4,00	laporan	20.248.000	0	0	4,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1,00	Dokumen	20.248.000	0	0	1,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		1,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	2	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang	6,00	komunitas	113.170.000	0	0	6,00	113.170.000	2,00	13.320.000	2,00	13.320.000	33,33	12	2,00	13.320.000	33,33	11,77	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	5,00	kali	113.170.000	0	0	5,00	0	2,00	2,00	2,00	2,00	40,00		2,00		40		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10,00	media	113.170.000	0	0	10,00	0	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00		3,00		30		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peralatan studio yang diadakan	0	unit	113.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4,00	laporan	113.170.000	0	0	4,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1,00	Dokumen	113.170.000	0	0	1,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		1,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	2	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	4,00	diseminasi	76.150.000	0	0	4,00	76.150.000	0	1.373.500	0	1.373.500	0,00	2	0	1.373.500	0	1,80	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	4,00	daftar	76.150.000	0	0	4,00	0	0	0	0	0	0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan	4,00	daftar	76.150.000	0	0	4,00	0	0	0	0	0	0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
														I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100			
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
						Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	4,00	daftar	76.150.000	0	Rp	4,00		4,00		4,00		100,00		4,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD,Kecamatan dan Desa	170,00	orang	76.150.000	0		170,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah layanan informasi terkait NTPD yang ditindaklanjuti	0	%	76.150.000	0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	4,00	laporan	76.150.000	0		4,00		1,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1,00	Dokumen	76.150.000	0		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah pengaduan darurat yang ditindaklanjuti	0	Aduan	76.150.000	0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah sarana prasarana/peralatan pendukung Call Center 112	0	Unit	76.150.000	0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	2	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10,00	laporan	50.000.000	0	0	10,00	50.000.000	10,00	0	10,00	0	100,00	0	10,00	0	100	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Layanan Hubungan Media	10,00	Layanan	50.000.000	0		10,00		10,00		10,00		100,00		10,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	2	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media	6,00	kegiatan	160.293.000	0	0	6,00	160.293.000	0	29.250.000	0	29.250.000	0,00	18	0	29.250.000	0	18,25	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	0	orang	160.293.000	0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah koordinasi terkait dengan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4,00	Laporan	160.293.000	0		4,00		1,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1,00	Dokumen	160.293.000	0		1,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	2	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1,00	Dokumen	12.518.000	0	0	1,00	12.518.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis	50,00	orang	12.518.000	0		50,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1																										
	2	16	2	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4,00	media komunikasi	12.518.000	0		4,00		4,00		4,00		100,00		4,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
						Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4,00	laporan	12.518.000	0		4,00		1,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
						Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	30,00	iklan	406.736.000	0	0	30,00	406.736.000	7,00	1.733.500	7,00	1.733.500	23,33	0	7,00	1.733.500	23,33	0,43		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik	50,00	orang	406.736.000	0		50,00		0		0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	12,00	unit	406.736.000	0		12,00		0		0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4,00	laporan	406.736.000	0		4,00		1,00		1,00		25,00		1,00		25			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	5,00	Orang	406.736.000	0		5,00		0		0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	2	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1,00	Dokumen	7.600.000	0	0	1,00	7.600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	2,00	laporan	7.600.000	0		2,00		1,00		1,00		50,00		1,00		50			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta bimtek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	Orang	7.600.000	0		0		0		0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah sarana prasarana alat kelengkapan maupun pendukung terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi	0	Unit	7.600.000	0		0		0		0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	2	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik	5,00	media	491.221.000	0	0	5,00	491.221.000	5,00	27.383.850	5,00	27.383.850	100,00	6	5,00	27.383.850	100	5,57		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak	50,00	media	491.221.000	0		50,00		12,00		12,00		24,00		12,00		24			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah	38,00	media	491.221.000	0		38,00		9,00		9,00		23,68		9,00		23,68			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta Bimtek jurnalistik	0	orang	491.221.000	0		0		0		0		0,00		0		0			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100			
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
					Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan	0	unit	491.221.000	0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media	4,00	laporan	491.221.000	0		4,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi	1,00	Dokumen	491.221.000	0		1,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																24.09	9.81			24.09	9.81			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																			
	2	16	3	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup																			
	2	16	3	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang	95,00	kegiatan	46.225.000	0	0	95,00	46.225.000	25,00	46.178.775	25,00	46.178.775	26,32	100	25,00	46.178.775	26,32	99,90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah daerah	4,00	laporan	46.225.000	0		4,00		1,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	3,00	Dokumen	46.225.000	0		3,00		1,00		1,00		33,33		1,00		33,33		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	3	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses	46,00	OPD	1.334.800.000	0	0	46,00	1.334.800.000	46,00	4.795.200	46,00	4.795.200	100,00	0	46,00	4.795.200	100	0,36	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	46,00	OPD	1.334.800.000	0		46,00		46,00		100,00		46,00		100		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Besaran bandwidth yang disediakan	0,50	giga	1.334.800.000	0		0,50		0,50		100,00		0,50		100		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	53,00	kali	1.334.800.000	0		53,00		12,00		12,00		22,64		12,00		22,64		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode				Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100				
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1																									
					Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK	10,00	laporan	1.334.800.000	0		10,00		2,00		2,00		20,00		2,00		20		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
					Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27,00	Unit	1.334.800.000	0		27,00		27,00		27,00		100,00		27,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2	16	3	2.0	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
	2	16	3	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan	2,00	Dokumen	150.000.000	0	0	2,00	150.000.000	1,00	0	1,00	0	50,00	0	1,00	0	50	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	3,30	indeks	150.000.000	0		3,30		2,00		2,00		60,61		2,00		60,61		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
					Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government	6,00	laporan	150.000.000	0		6,00		2,00		2,00		33,33		2,00		33,33		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2	16	3	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	46,00	OPD	187.062.000	0	0	46,00	187.062.000	0	4.820.000	0	4.820.000	0,00	3	0	4.820.000	0	2,58	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1,00	Unit	187.062.000	0		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
					Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	46,00	OPD	187.062.000	0		46,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5,00	laporan	187.062.000	0		5,00		2,00		2,00		40,00		2,00		40		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
					Jumlah sarana dan prasarana data center yang diadakan	0	Unit	187.062.000	0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2	16	3	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis	60,00	fasilitasi	285.284.000	0	0	60,00	285.284.000	15,00	0	15,00	0	25,00	0	15,00	0	25	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintah daerah	5,00	laporan	285.284.000	0		5,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen	285.284.000	0		1,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2	16	3	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22,00	jenis data	101.240.000	0	0	22,00	101.240.000	22,00	0	22,00	0	100,00	0	22,00	0	100	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100			
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
					Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	4,00	sistem elektronik	101.240.000	0		4,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	4,00	laporan	101.240.000	0		4,00		1,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46,00	OPD	101.240.000	0		46,00		46,00		46,00		100,00		46,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	3	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	46,00	OPD	953.845.000	0	0	46,00	953.845.000	15,00	0	15,00	0	32,61	0	15,00	0	32,61	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	183,00	sistem	953.845.000	0		183,00		5,00		5,00		2,73		5,00		2,73		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis	4,00	laporan	953.845.000	0		4,00		1,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	22,00	Unit	953.845.000	0		22,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	3	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	4,00	aplikasi	115.186.000	0	0	4,00	115.186.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9,00	layanan	115.186.000	0		9,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	14,00	layanan	115.186.000	0		14,00		3,00		3,00		21,43		3,00		21,43		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan	3,00	laporan	115.186.000	0		3,00		1,00		1,00		33,33		1,00		33,33		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9,00	Layanan	115.186.000	0		9,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	3	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2,00	capaian	25.500.000	0	0	2,00	25.500.000	2,00	0	2,00	0	100,00	0	2,00	0	100	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	6,00	laporan	25.500.000	0		6,00		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart	1,00	Dokumen	25.500.000	0		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode				Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																
																									5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
																									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	16	3	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	5,00	orang	67.695.000	0	0	5,00	67.695.000	0	1.960.000	0	1.960.000	0,00	3	0	1.960.000	0	2,90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
						Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh	50,00	orang	67.695.000	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
						Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang	100	orang	67.695.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3,00	laporan	67.695.000	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	1,00	Dokumen	67.695.000	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
2	16	3	11		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	4,00	kali	40.000.000	0	0	4,00	40.000.000	1,00	0	1,00	0	25,00	0	1,00	0	25	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4,00	laporan	40.000.000	0	0	4,00	0	1,00	1,00	0	0	25,00	0	1,00	0	25	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1,00	Dokumen	40.000.000	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																32.42	26.43			32.42	26.43																			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																																			
4	2	20	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																																			
2	20	2	2.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																																			
2	20	2	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	1,00	Dokumen	92.000.000	0	0	1,00	92.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100				
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	20	2	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	laporan	92.000.000	0		0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	2	20	2	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	27,00	Orang	60.000.000	0	0	27,00	60.000.000	27,00	59.400.000	27,00	59.400.000	100,00	99	27,00	59.400.000	100	99,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	0	laporan	60.000.000	0	0	0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	2	20	2	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1,00	Dokumen	60.000.000	0	0	1,00	60.000.000	1,00	0	1,00	0	1,00	0	100	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	0	laporan	60.000.000	0	0	0		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																33,33	99			33,33	99				
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
5	2	21	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																				
	2	21	2	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
	2	21	2	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen	21.511.500	0	0	1,00	21.511.500	0	1.800.000	0	1.800.000	0,00	8	0	1.800.000	0	8,37	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	2,00	Laporan	21.511.500	0	0	2,00		0		0		0		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21	2	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1,00	Laporan	230.000.000	0	0	1,00	230.000.000	0	49.000.000	0	49.000.000	0,00	21	0	49.000.000	0	21,30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	50,00	Orang	230.000.000	0	0	50,00		50,00		50,00		100,00		50,00		100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode				Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100			
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3,00	Orang	230.000.000	0		3,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi	1,00	Unit	230.000.000	0		1,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	2	21	2	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non	1,00	Laporan	50.000.000	0	0	1,00	50.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan	108,00	Layanan	50.000.000	0		108,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	1,00	Laporan	50.000.000	0		1,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	2	21	2	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	6,00	PD	20.000.000	0	0	6,00	20.000.000	6,00	0	100,00	0	6,00	0	100	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	1,00	Layanan	20.000.000	0		1,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1,00	CSIRT	20.000.000	0		1,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	4,00	Laporan	20.000.000	0		4,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	2	21	2	2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kota																			
	2	21	2	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	6,00	PD	12.835.500	0	0	6,00	12.835.500	6,00	0	100,00	0	6,00	0	100	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah Layanan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1,00	Layanan	12.835.500	0		1,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sandi	1,00	Unit	12.835.500	0		1,00		0		0,00		0		0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
					Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	4,00	Laporan	12.835.500	0		4,00		1,00		25,00		1,00		25		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																20.59	14.84			20.59	14.84			
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Renda	Sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				5	6	7	8	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14 = 6+12	15 = 14/5x100										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)														28.18	39.79			28.18	39.79		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -																					
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : -																					
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya : -																					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, yang telah dilakukan. Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah *pembantuan dibidang* Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022). Adapun yang dimaksud manajemen Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi yaitu :

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. peningkatan implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. peningkatan sistem data yang terintegrasi secara sistematis;
- d. peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- e. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. pengelolaan layanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. pengelolaan layanan manajemen data statistik sektoral sebagai walidata;
- i. pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi;
- j. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

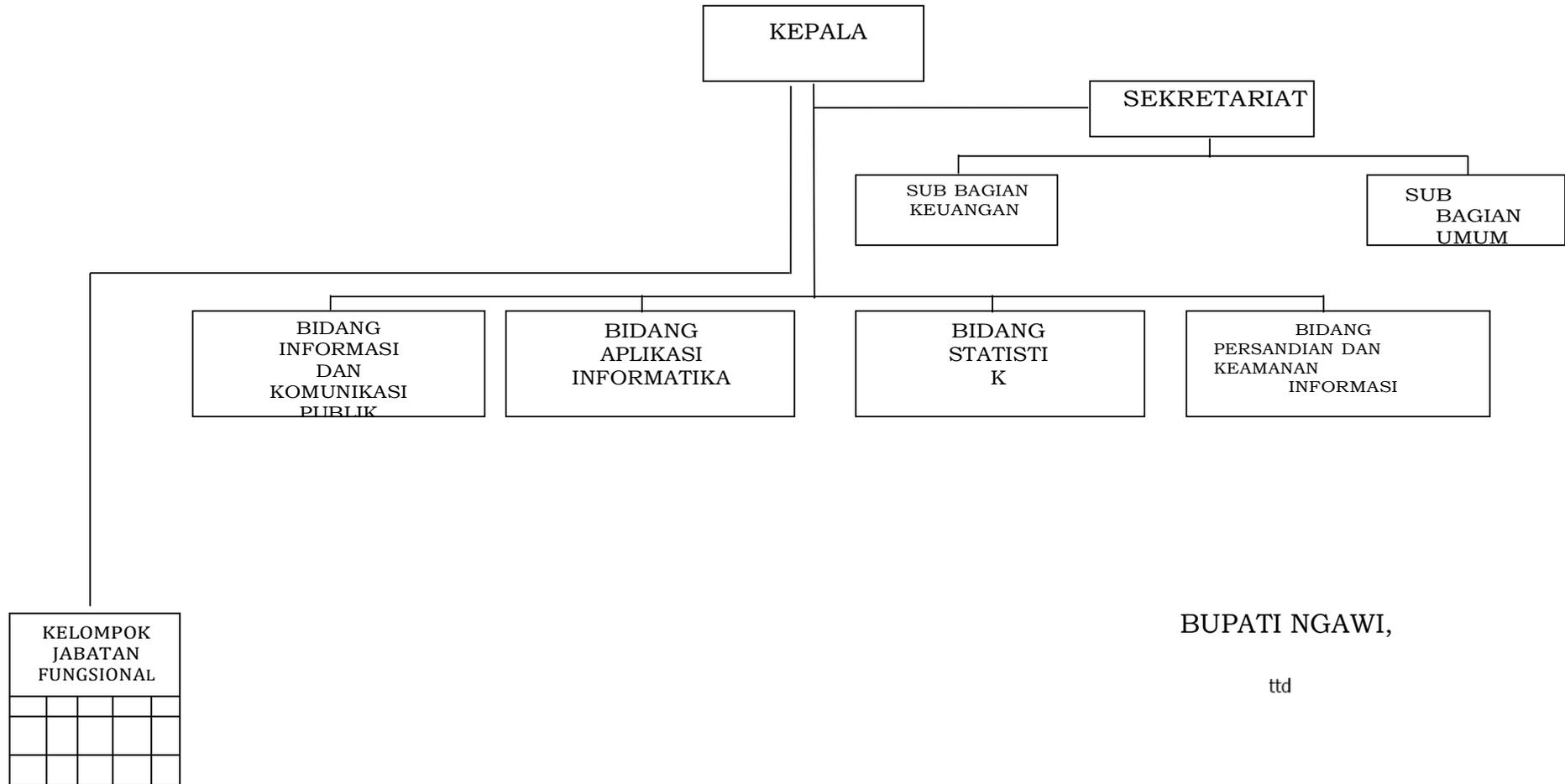
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diberikan kewenangan, yaitu :

- a. pengelolaan opini, aspirasi publik dan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan media;
- b. pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain, pelayanan publik *Government Chief Information Officer*, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi;
- d. pengelolaan aplikasi umum, khusus dan pengembangannya yang terintegrasi;
- e. pengelolaan infrastruktur, data center, layanan pengembangan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan analisis perencanaan data serta pelaksanaan sebagai walidata;
- g. pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai walidata;
- h. pengelolaan tata kelola persandian; dan
- i. pengelolaan keamanan informasi.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian seperti dalam lampiran berikut;

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Dengan telah diberikannya kewenangan penuh kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengelola manajemen Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka sangat diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga akan tercipta manajemen Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang handal, profesional dan akuntabel serta mampu bersaing dalam era globalisasi dan informasi yang semakin berkembang dan maju. Agar tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dalam pelaksanaannya dibagi dalam 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dalam pembagian tugas dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagai sarana publikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik, informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi komunikasi publik yang mencakup penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program dalam rangka terwujudnya layanan e-Government dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer*;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan tata kelola, pengembangan

aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;

- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Aplikasi Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka terwujudnya standarisasi dan integrasi data statistik sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- c. pelaksanaan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application*

- Programming Interface dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang Statistik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi e-Government;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi meliputi ;

1. Nilai LHE Akip Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai LHE Akip Perangkat Daerah ada beberapa kegiatan yang sudah

dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain menertibkan administrasi baik dari bagian Perencanaan, bagian Umum dan bagian Keuangan sebagai pendukung kelancaran urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga ada inovasi OBSESI (Obrolan Seputar Tupoksi) yang rutin dilaksanakan setiap hari senin yang didalamnya membahas seluruh program kegiatan dan rencana aksi dari masing – masing bidang sesuai tupoksi, sehingga bisa selalu terpantau progress pelaksanaan dan evaluasinya.

2. Cakupan layanan telekomunikasi.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja cakupan layanan telekomunikasi ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain;

- a. PENERAPAN TATA KELOLA TIK, dalam hal ini Peningkatan e-Gov Tata Kelola TIK diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.a tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1.a tentang SPBE dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 480/790/404.114/2019 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Peraturan Bupati Ngawi dan Surat Edaran Sekretariat Daerah ini menjadi acuan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pembangunan dan pengembangan TIK. Inovasi dari pengelolaan Tata Kelola Informatika adalah SIMONEV Aplikasi (Sistem Monitoring Evaluasi Aplikasi, manfaatnya adalah untuk database keseluruhan aplikasi yang ada di Kabupaten Ngawi. Selain itu dalam rangka implementasi e – government serta percepatan digitalisasi pemerintahan, teretus ide

inovasi PING (Portal Informasi Ngawi) dimana didalamnya banyak berita, dan informasi terkait Kabupaten Ngawi mulai dari destinasi wisata, produk unggulan, informasi terkait fasilitas umum milik pemerintah, makanan khas dan lain sebagainya;

- b. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK, merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- c. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- d. MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK / ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik melalui media cetak, situs www.kominfo-ngawikab.go.id dan media sosial Facebook, Instagram, Radio Suara Ngawi. Untuk mempermudah kegiatan kerjasama dengan media tercetuslah ide inovasi SENJA (Sistem Elektronik Kerja Sama Media) dimana proses kerjasamanya harus melalui verifikasi dengan kecukupan dokumen – dokumen pendukungnya;
- e. MAJALAH TRINIL DAN GALERI, merupakan sarana / media untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- f. UBLIK (Umyek Bareng Lintas Komunitas), merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi publik yang melibatkan Lintas Komunitas yang ada di Ngawi Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik serta banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
- g. HELP DESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI, merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi

- dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja).
- h. HELP DESK SP4N LAPOR merupakan jenis pelayanan pengaduan opini dan aspirasi publik dari masyarakat dan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang menangani untuk segera ditindaklanjuti.
 - i. Ada beberapa inovasi yang telah diciptakan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diantaranya;

Hasil kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Ngawi pada kurun waktu kinerja 5 tahun dapat dikatakan baik. Sebagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ngawi terkait dengan pengembangan *smart city* tentunya peningkatan dan pengembangan aplikasi sebagai sarana pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama percepatan pengembangan Indeks SPBE sebagai pengukur kinerja urusan Komunikasi dan Informatika pemerintah Kabupaten Ngawi. Semangat percepatan *smart city* sebagai program unggulan untuk digitalisasi pelayanan publik juga bisa dilihat dengan tingginya capaian dari Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan. Faktor lain yang cukup mempengaruhi kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Ngawi dalam upaya digitalisasi pelayanan yaitu capaian dari persentase organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo sebesar 100%. Selain pemantapan sistem pada internal pemerintahan, optimalisasi cakupan akses internet untuk masyarakat juga mengambil peran pada pengembangannya. Sekitar 80% cakupan layanan komunikasi tersedia untuk warga

dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet sebesar 62,68% dari 78,90% proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada capaian Tahun 2022 . Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi memang menunjukkan capaian kinerja dengan nilai yang cukup positif. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah, hasil realisasi di tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan angka 36% secara konsisten. Realisasi yang masih kurang dari 100% tersebut terjadi karena masih banyak sistem layanan publik dan layanan administrasi Kabupaten Ngawi yang belum terintegrasi. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai berupaya untuk membangun arsitektur sistem layanan publik dan administrasi terintegrasi di tahun 2024. Selain persentase layanan publik dan layanan integrasi yang terintegrasi, juga terdapat Persentase data yang dapat berbagi pakai dengan hasil realisasi di bawah 100% yaitu 58% di tahun 2021 hingga 2022. Hampir sama dengan kasus terkait ketersediaan sistem terintegrasi untuk pelayanan publik dan administrasi, karena sistem data yang belum terintegrasi dengan baik sehingga ketersediaan data yang dapat berbagi pakai juga masih kurang, oleh karenanya hasil realisasinya belum bisa mencapai 100%. Pada akhirnya pembangunan arsitektur sistem layanan publik dan administrasi yang terintegrasi juga menjadi solusi untuk masalah ketersediaan data berbagi pakai. Adapun pencapaian dan rencana pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagaimana terlampir

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sudah dilaksanakan secara bertahap sesuai Tujuan dan Sasaran Renstra mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur terkait pembangunan jaringan Fiber Optik di 27 titik dan pembangunan Data Center dalam rangka menunjang kelancaran ketersediaan jaringan Informasi teknologi di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK dan layanan publik. Sesuai kewenangannya maka untuk pengadaan Bandwidth untuk seluruh OPD, kecamatan, ruang publik dan pasar dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelayanan publik maka pengadaan Bandwidth semua dicukupi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam pelayanan e – government sudah diterapkan sesuai manajemen SPBE secara efisien, efektif dan berkesinambungan dengan langkah mempercepat implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi ; integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, integrasi data kepegawaian, integrasi data kearsipan, integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat data nasional untuk meningkatkan nilai SPBE agar menjadi lebih baik lagi, selain itu juga telah disusun Dashboard eksekutif dalam rangka persiapan penyusunan Data Statistik Sektoral Satu Data Indonesia, selain itu juga penerapan sistem elektronik berbasis android dalam pemerintahan dalam rangka pengelolaan layanan publik sesuai standart. Ditahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			86.20	89.55	89.60	89.70	89.35	89.35	86.70	86.70	
	Cakupan layanan telekomunikasi			80%	80%	90%	100%	80%	80%	90%	90%	
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi			65%	70%	75%	80%	65%	65%	75%	75%	
	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Indeks KAMI			300	301	303	305	300	300	303	305	
			IKK OUTCOME									
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	70%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	60	60	60	60	60	60	60	60	
			IKK OUTPUT									
			Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	90%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	
			Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
			Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	80%	90%	90%	90%	80%	80%	90%	90%	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	85%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	85%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	60%	70%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	85%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	
			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	60%	70%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	
			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	60%	70%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	85%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	
			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	80%	90%	90%	90%	80%	80%	90%	90%	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	
			Persentase data yang dapat berbagi pakai	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	85%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	
			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	
			Tersedianya buku profil daerah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
			Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	60%	70%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	
			Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	60%	70%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	80%	90%	90%	90%	80%	80%	90%	90%	

telah membangun Mini Command Center sebagai ruang kendali terkait pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terdapat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintah daerah ;
2. Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Menciptakan masyarakat pedesaan yang sadar dan melek dunia digital serta mampu menangkal berita hoax ;
4. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik ;
5. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi ;
6. Smart City ;
7. Masyarakat Digital Industri 4.0 ;
8. Government Chief Information Officer (GCIO) ;
9. Satu Data Indonesia ;
10. Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (*smart city*).

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintah daerah ;
2. Belum optimalnya keterbukaan Informasi Publik ;
3. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam Sistem Pemerintahan berbasis elektronik belum maksimal;
4. Pelaksanaan Smart City secara bertahap ;

5. Kesiapan masyarakat menghadapi Digital Industri 4.0 ;
6. Implementasi Satu Data Indonesia ;
7. Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (*smart city*).

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Pesatnya perkembangan TIK;
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK;
5. Data yang tidak akurat dan terpercaya;
6. Kesenjangan informasi di masyarakat;

Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan SPBE
5. Tersedianya data sektoral
6. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo
7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

Dampak terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional / internasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan pengelolaan opini dan

aspirasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi generik dan spesifik, pengelolaan e - government , infrastruktur data center , pengelolaan manajemen data dan informasi e – government, data statistik sektoral, pengelolaan keamanan informasi e – government, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Ngawi, sehingga diharapkan dengan totalitas dalam pencapaian pelayanan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mampu mendukung dalam pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sesuai dengan tugas , fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima			
	Program Prioritas : 1. Branding Negeri Ngawi Ramah 2. Smart Village			

	<p>Program Informasi Komunikasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik - Belum adanya manajemen isu pemerintah sehingga program dan kebijakan pemerintah lebih banyak tersampaikan secara sporadis dan situasional alih-alih terencana dan terukur 	<p>Belum adanya strategi komunikasi pemerintah daerah yg merencanakan mulai dari penyusunan agenda, framing isu, pemilihan komunikator, alternatif channel (saluran media) dan monitoring media.</p>	<p>Tersusunnya agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah Ada SOP yg jelas terkait pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Ada evaluasi dan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas Akan diaktifkan lagi NGOPI BARENG (Komunikasi publik dikolaborasi dengan serap aspirasi) Bersama Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagai wahana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Fasilitasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) masing-masing OPD</p>
	<p>Program Aplikasi Informatika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya jumlah Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK - Infrastruktur jaringan yang belum optimal - Penerapan SPBE bagi Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Center - Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata - Belum adanya mekanisme SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK - Tersedianya perundangan yang mendasari

		<p>Internal Birokrasi dan Layanan Publik Tidak menjadi prioritas program kerja pembangunan sesuai visi misi pada Instansi Pusat/Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Belum optimalnya Tata Kelola SPBE - Belum terwujudnya fungsi GCIO - Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK 	<p>Ruang Komando</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia TIK yang trampil dan professional - Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart City - Minimnya Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik/Web - - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	<p>regulasi bidang Kominfo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang tidak akurat dan terpercaya karena tidak updating - Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku - Rendahnya kepercayaan pengguna data terhadap Data Statistik Sektoral - Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik sektoral di pemerintah kab/kota yang belum memadai - 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengintergrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah - Masih rendahnya pengelolaan data administrasi - Ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM statistik di pemerintah provinsi/kab/kota yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data statistik sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamana	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi yang akan dibangun oleh Perangkat Daerah harus

	n Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan kedudukan organisasi pelaksana urusan pemerintah bidang persandian belum dilakukan sesuai ketentuan - Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> standard keamanan sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi - Fungsi proteksi di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien - Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi - Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi
--	-------------	--	--	--

Ada beberapa capaian kinerja yang kemudian masih perlu untuk ditingkatkan dan dioptimalkan dalam proses pencapaiannya diantaranya terkait dengan pengintegrasian aplikasi pada setiap dinas ataupun unit kerja di jajaran perangkat daerah Kabupaten Ngawi yang masih belum sepenuhnya tercapai. Selain itu optimalisasi pemanfaatannya dalam pemenuhan pelayanan publik juga perlu untuk ditingkatkan agar kemudian mampu memberikan nilai kepuasan kepada masyarakat secara maksimal. Pada akhirnya pembangunan arsitektur sistem layanan publik dan administrasi yang terintegrasi juga menjadi solusi untuk masalah ketersediaan data berbagi pakai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD sudah tertuang dalam rancangan strategis lima tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan perencanaan yang benar – benar dipersiapkan sesuai blue print tahapan Smart City, tahapan tahun ke – lima diharapkan pembangunan infrastruktur Fiber Optik dan Data Center sudah terlaksana sehingga bisa mendukung pembangunan Teknologi Informatika di Kabupaten Ngawi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Review terhadap rancangan Awal RKPD merupakan proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Review hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi capaian selama 5 (lima) tahun terakhir serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ,sehingga dirumuskan beberapa kegiatan prioritas yang harus segera diimplementasikan adalah sebagai berikut ;

1. Kecupukuan Bandwidth untuk kebutuhan seluruh PD dan ruang publik ;
2. Smart City ;
3. Pengoptimalan pencapaian Indeks SPBE;
4. Pengembangan Dashboard Excecutive dan Portal Data ;
5. Pemberian pelayanan dan Informasi berbasis android ;
6. Pengadaan Bandwidth pasar untuk aplikasi e – retribusi ;
7. Peningkatan peran Bakohumas ;
8. Penyusunan regulasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
9. Bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
10. Peremajaan sarana dan prasarana studio Radio Suara Ngawi;
11. Peningkatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ;
12. Satu Data Indonesia ;
13. Pengoptimalan pencapaian Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Award;
14. Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (*smart city*).

Analisis kebutuhan yang lebih penting untuk terlebih dulu dilaksanakan tanpa mengurangi substansi dan kualitas dari pelayanan yang seharusnya dilaksanakan, sehingga perlu dilaksanakan review terlebih dahulu terhadap rancangan awal RKPD dengan benar – benar menganalisis substansi dari masing – masing program kegiatan dengan melihat dampaknya terhadap jalannya pemerintahan juga terhadap masyarakat. Setelah dilakukan review terhadap rancangan awal bisa disimpulkan ada beberapa program / kegiatan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya sehingga harus diprioritaskan dan ada kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya ditahun berikutnya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
kabupaten Ngawi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)				
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.50	7,080,738,322			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.50	7,764,899,659					
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	7,080,738,322	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	7,764,899,659					
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	42,800,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	11,998,000				
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5,400,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1,720,000	
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,215,000	
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,215,000	
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,240,000	
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,240,000	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	21,400,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	3,368,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting				
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)						
2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	5,722,329,008	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	6,120,237,723	
2	16	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dok	5,679,529,008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dok	6,112,477,723	
2	16	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	21,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,780,000	
2	16	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	21,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	4,980,000	
2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	45,806,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	380,000,000	
2	16	01	2.05	0001		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	16,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-	
2	16	01	2.05	0010		Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	29,806,000	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	380,000,000	
2	16	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	153,833,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	201,314,136	
2	16	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,706,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7,472,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	31,815,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	56,218,500	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	21,400,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2,784,000	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10,700,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	12,426,000	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	4,212,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	2,040,000	
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	2,310,000	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	75,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	118,063,636	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%	260,033,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%	524,409,800	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5unit	105,380,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5unit	313,761,000	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 UNIT	12,400,000	Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 UNIT	67,390,000	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	81,125,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	113,258,800	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2unit	22,155,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1unit	30,000,000	0
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan		38,973,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1unit	30,000,000	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	451,761,314	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	427,940,000	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,100,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	-	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	294,867,814	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	274,200,000	
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	71,662,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	64,800,000	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	82,131,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	88,940,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	404,176,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	99,000,000	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1unit	32,133,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1unit	12,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)			
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4unit	53,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4unit	26,000,000	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngawi, Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	52,010,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	31,000,000	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	266,533,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	30,000,000	
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		
2	16						Cakupan layanan telekomunikasi	95.00%	9,077,045,000			Cakupan layanan telekomunikasi	95.00%	3,140,007,000	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	80%	3,518,884,500	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	80%	873,957,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
Kode Rek		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
									Jumlah peserta Bimtek jurnalistik	100 orang					
									Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan	3 unit					
									Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas	50 laporan					
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen	144,703,000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	144,703,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	8 kegiatan				Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	8 kegiatan		
							Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	150 orang				Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	150 orang		
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan informasi publik	12 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan informasi publik	12 laporan		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	16	02	2.01	0011	Penguatan tata kelola Komisi Informasi Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 dokumen	49,733,500	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	7,500,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	2 laporan				Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	2 laporan		
							Jumlah peserta bimtek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	50 orang				Jumlah peserta bimtek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	50 orang		
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	240,000,000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	63,500,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	4diseminasi				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	4diseminasi		
							Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	4 daftar				Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	4 daftar		
							Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan	4 daftar				Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan	4 daftar		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting						
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)					
			Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	4 daftar				Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	4 daftar							
			Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD, Kecamatan dan Desa	150 orang				Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD, Kecamatan dan Desa	150 orang							
			Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	4 laporan							
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 layanan	111,352,500	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	50,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10 laporan			
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	235,270,500	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	49,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	55 aduan				Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	55 aduan			
							Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan	60 orang				Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan	60 orang			
							Jumlah peserta admin SP4N-LAPOR!	60 orang				Jumlah peserta admin SP4N-LAPOR!	60 orang			
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	2 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	2 laporan			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting					
Kode Rek					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
								Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	1 kali				Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	1 kali		
2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	100,000,000	Diseminasi Informasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	44,125,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis	120 orang				Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis	120 orang			
							Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4 media komunikasi				Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4 media komunikasi			
							Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4 laporan				Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4 laporan			
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	515,852,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	113,170,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	6 komunitas				Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	6 komunitas			
							Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	5 kali				Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	5 kali			
							Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10 media				Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10 media			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)				
			Jumlah peralatan studio yang diadakan	4 unit				Jumlah peralatan studio yang diadakan	4 unit						
			Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4 laporan						
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 unit							
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	16,702,000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-	Perubahan pemutakhiran ke - 4
					Jumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang terpublikasi			80 agenda				Jumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang terpublikasi	80 agenda		
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti			4 laporan				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	4 laporan		
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen	10,100,000		Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi				
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	72,380,000	Penyusunan Konten	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	20,248,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
					Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			20 konten				Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	20 konten		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)				
			Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	50 orang				Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	50 orang						
			Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4 laporan						
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	5 orang	686,746,000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	90,490,000	
							Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	35 iklan				Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	35 iklan		
							Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik	100 orang				Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik	100 orang		
							Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	14 unit				Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	14 unit		
							Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4 laporan		
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan e - government yang terintegrasi	90%	5,558,160,500	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan e - government yang terintegrasi	90%	2,266,050,000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95%	334,025,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95%	64,500,000	
							Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	95%				Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	95%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5 domain	167,012,500	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	64,500,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah	4 laporan		
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	167,012,500		Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara	100	-	
							Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100							
							Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah	4 laporan							
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	95%	5,224,135,500	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	95%	2,201,550,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting						
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)					
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	95%				Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	95%							
			Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	95%				Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	95%							
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	1 dokumen	194,866,000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	100,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	4 kali				Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti				
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>				
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen			Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi					
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	722,663,500	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	245,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
Kode Rek		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)			
					Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	7 OPD			Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	7 OPD					
					Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	7 OPD			Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	7 OPD					
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5 laporan			Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5 laporan					
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 OPD	111,352,500	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	100,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
					Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22 jenis data			Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22 jenis data					
					Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	4 sistem elektronik			Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	4 sistem elektronik					
					Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	4 laporan			Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	4 laporan					
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	222,705,000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	150,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
					Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	3.4			Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	3.4					
					Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government	6 laporan			Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government	6 laporan					

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting					
Kode Rek		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)				
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	22 Unit	389,734,000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	174,650,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	13 OPD				Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	13 OPD			
							Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22 sistem				Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22 sistem			
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	4 laporan			
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 layanan	222,705,000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	30,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah aplikasi yang terintegrasi	4 aplikasi				Jumlah aplikasi yang terintegrasi	4 aplikasi			
							Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan				Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)				
			Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	14 layanan				Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	14 layanan						
			Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan	3 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan	3 laporan						
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	334,057,500	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan	Dokumen	-	Perubahan pemutakhiran ke - 4
					Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK		14 aspek					Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK	14 aspek		
					Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran		6 laporan					Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran	6 laporan		
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	unit			Perubahan pemutakhiran ke - 4
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 dokumen	194,866,000	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	-	Perubahan pemutakhiran ke - 4
					Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan		2 capaian					Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	2 capaian		
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota		6 laporan					Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota	6 laporan		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)			
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27 unit	2,340,957,500	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	1,335,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah ataumenggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas		46 OPD			Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah ataumenggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas			
							Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah		46 OPD			Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah			
							Besaran bandwidth yang disediakan		600 Mbps			Besaran bandwidth yang disediakan			
							Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK		53 kali			Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK			
							Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK		10 laporan			Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK			
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	167,028,500	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-	Perubahan pemutakhiran ke - 4

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting				
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian						
			Jumlah fasilitasi sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	80 fasilitasi				Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	46 OPD						
			Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintah daerah	5 laporan				Besaran bandwidth yang disediakan	600 Mbps						
								Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	53 kali						
								Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK	10 laporan						
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	323,200,000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen	66,900,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	25 orang				Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	25 orang		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
Kode Rek		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
				Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	300 orang				Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	300 orang		
				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	300 orang				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	300 orang		
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3 laporan		
				Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46 OPD							
2	20			Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	90%	1,128,108,490			Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	90%	141,000,000	
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	1,128,108,490	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	141,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting				
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)						
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	260,000,000						
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	75%	1,128,108,490	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	75%	401,000,000	
								Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	75%				Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	75%		
								Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	75%				Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	75%		
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari	47 orang	37,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	200,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	4 laporan								
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	207,772,490						-	
							Jumlah laporan hasil koordinasi Pengembangan	1 laporan								
2	20	02	2.01		Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 orang	194,233,000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	-	Perubahan pemutakhiran ke - 4	
							Jumlah laporan hasil koordinasi Peningkatan kapasitas SDM Pemda	2 laporan								
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	132,110,000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	60,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)				
			Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik	1 laporan											
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	456,645,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	141,000,000	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	100,348,000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	-	Perubahan pemutakhiran ke - 4
							Jumlah Metadata statistik sektoral yang dihimpun	3 metadata							
							Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan metadata statistik sektoral	4 laporan							
2	21						Indeks KAMI	303	870,261,000			Indeks KAMI	303	506,700,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	90%	870,261,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	90%	506,700,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard	90%	758,908,500	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard	90%	456,700,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	111,352,500	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	151,700,000	
							Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	2 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	2 laporan		
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	55,676,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	205,000,000	
							Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3 orang				Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3 orang		
							Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerinthan berbasis Eklektronik (SPBE)	3 orang				Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerinthan berbasis Eklektronik (SPBE)	3 orang		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)				
			Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	50 orang						
			Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 unit				Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 unit						
			Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan											
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	307,015,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50,000,000	
							Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	5				Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	5		
							Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	108				Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	108		
							Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	38				Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	38		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode Rek					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	1 Laporan				Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	1 Laporan		
							Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 laporan				Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 laporan		
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 OPD	284,865,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 OPD	50,000,000	
							Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	1 layanan				Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	1 layanan		
							Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1 CSIRT				Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1 CSIRT		
							Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan							
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang	90%	111,352,500	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang	90%	50,000,000	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 OPD	111,352,500	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 OPD	50,000,000	
							Jumlah Layanan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan				Jumlah Layanan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	4 unit				Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	4 unit		
			Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi	8 unit				Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi	8 unit		
			Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah	4 laporan							

18,156,152,812

11,812,606,659

2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkair langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten Ngawi yang lain langsung ditujukan kepada PD bersangkutan.

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

Dinas Komunikasi, Informatika, &
Statistik dan Persandian

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>N</i>	<i>I</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 agar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi selalu mengacu pada target nasional dan propinsi, maka uraian Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2020-2024

VISI : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong			
MISI :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur	1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara

<p>TIK berkualitas diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspel, bisnis, masyarakat dan pemerintahan , yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan</p> <p>3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik</p>	<p>terjangkau;</p> <p>2. Meningkatnya cakupan wilauah yang terlayani penyiaran digital;</p> <p>3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;</p> <p>4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;</p> <p>5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos , telekomunikasi dan informatika;</p> <p>6. Meningkatnya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis;</p>	<p>belum terlayani termasuk lokasi layanan public</p>	<p>ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;</p> <p>2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan</p> <p>3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.</p>
		<p>Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan</p>	<p>1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G);</p> <p>2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan</p> <p>3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.</p>
		<p>Mengembangkan SDM talenta digital dan</p>	<p>1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan</p>

	7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital; 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	ekosistem ekonomi digital	meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
		Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital Pemerintahan	1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

		Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
		Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

<p>VISI : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"</p>			
<p>MISI 3 : "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Transparansi,	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

<p>Akses dan Data Sektoral dengan</p>			
<p>Memfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik</p>	<p>2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur</p>	<p>1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga komunikasi publik dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah</p>	<p>Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan komunikasi</p>
		<p>2. Mengembangkan smart Province yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data</p>	<p>Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah</p>
	<p>3. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas</p>	<p>Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Prop. Jatim</p>	<p>Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya</p>
	<p>4. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi</p>	<p>Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur</p>	<p>Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur</p>

Dari beberapa analisa diatas bisa digaris bawahi beberapa kebijakan daerah yang dapat mendukung kebijakan nasional maupun provinsi berdasarkan tupoksi diantara ;

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi
 2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi
 3. Mengimplementasikan e – Government / SPBE
 4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
 5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk mewujudkan misi ke 3 (tiga) “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima”, maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;
2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik
3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada

kebijakan Satu Data Indonesia

5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dari ke 5 (lima) strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut ;

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
3. Mengimplementasikan e – government / SPBE;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1.	Tersedianya Sumberdaya Manusiayang cukup	1.	Terbatasnya sumberdaya manusia yangtrampil dan profesional
2.	Tersedianya media informasi dankomunikasi untuk didayagunakan	2.	Kurangnya kemampuan memberdayakanpotensi informasi dan komunikasi masyarakat
3.	Tersedianya anggaran	3.	Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando
4.	Tersedianya sarana prasarana yangmemadai	4.	Belum optimalnya tata kelola Data Center
5.	Terbangunnya Smart City	5.	Belum optimalnya pengembangan aplikasiTIK
6.	Adanya regulasi bidang kominfo	6.	Belum optimalnya pengintergrasian sisteminformasi dan data Perangkat Daerah
			Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata

Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman (Threats)
1.	Komitmen Kepala Daerah mendukungpeningkatan TIK	1.	Globalisasi informasi yang berdampakpada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	2.	Pesatnya perkembangan TIK
3.	Kebutuhan peningkatan kualitaspelayanan publik	3.	Semakin tingginya pemahamanmasyarakat terhadap TIK
4.	Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah	4.	Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadappengembangan TIK
5.	Program kemenkominfo Indonesiabebas sinyal 2020	5.	Semakin maraknya kejahatan siber
6.	Hubungan kerjasama yang baikdengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi	6.	Semakin tingginya informasi yang bersifathoax di masyarakat
7.	Ketersediaan data statistik sektoral	7.	Data yang tidak akurat dan terpercayakarena tidak updating
8.	Kesadaran masyarakat akanpentingnya informasi		

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (Opportunities) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK 2. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah 5. Program kemenkominfo Indonesiabebas sinyal 2020 6. Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi 7. Tersedianya data statistik sektoral 8. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 	<p>Ancaman (Threats) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Pesatnya perkembangan TIK 3. Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap TIK 4. Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK 5. Semakin maraknya kejahatan siber 6. Semakin tingginya informasi yang bersifat hoax di masyarakat 7. Data yang tidak akurat dan terpercayakarena tidak updating
<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Tersedianya anggaran 4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai 5. Terbangunnya smartCity 6. Adanya regulasi bidang kominfo 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi 2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik 3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data 4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan SatuData Indonesia 5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 6. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional 2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi informasi dan komunikasi masyarakat 3. Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando 4. Belum optimalnya tatakelola Data Center 5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 6. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi dimasyarakat 4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 5. Menyusun rencana induk Smart City 6. Meningkatkan kualitas SDM yang adadengan Bimbingan teknis bidang statistik 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem Informasidalam menghadapi globalisasi yang berdampak padaketerbukaan informasi publik 2. Meningkatkan pemberdayaan potensidan lembaga komunikasi masyarakatdalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kemampuan potensiiinformasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi 4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sisteminformasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan pemberdayaan potensiiinformasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi 6. Pengembangan dan pemanfaatanSmart City
--	---	--

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>VISI : " SEMESTA BERENCANA "</p> <p>"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"</p>			
<p>MISI : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi 2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik 	<p>Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan</p>

	pelayanan publik	3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	hubungan komunikasi Mengimplementasikan e - Government / SPBE
	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 2. Pencapaian SDGs;
 3. Pengentasan kemiskinan;
 4. Pencapaian NSPK dan SPM;
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir

Dalam rangka pencapaian visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI” , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu misi ke 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima. Strategi yang diambil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama ; Nilai LHE Akip, Cakupan Layanan Telekomunikasi, Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi, Indeks KAMI adalah dengan ; meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e – government dan kualitas pelayanan publik.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Jumlah program keseluruhan ada 5 program , 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan direncanakan untuk tahun 2025 dimana untuk pelaksanaan program kegiatan menyebar dengan sasaran seluruh perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Ngawi sehingga semua bisa mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga diharapkan semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Total keseluruhan pagu untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 11.812.606.659,-. Ada beberapa rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan ada beberapa

program kegiatan yang di tunda terlebih dahulu karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama. Lokasi program/kegiatan terfokus pada penyelenggara pemerintah daerah yaitu perangkat daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		86.50	7,764,899,659			86.50	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100%	7,764,899,659	-	-	100%	7,196,078,722
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu		100%	11,998,000	-	-	100%	45,000,000
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	11 Dokumen	1,720,000			11 Dokumen	6,000,000
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 Dokumen	1,215,000			1 Dokumen	4,500,000
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 Dokumen	1,215,000			1 Dokumen	4,000,000
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	2 Dokumen	2,240,000			2 Dokumen	4,000,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	2 Dokumen	2,240,000			2 Dokumen	4,000,000
2.16.01.2.01.0005	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	6 laporan	3,368,000			6 laporan	22,500,000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%	6,120,237,723	-	-	100%	5,781,322,220
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	26 dok	6,112,477,723			26 dok	5,736,322,220
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 laporan	2,780,000			1 laporan	22,500,000
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 laporan	4,980,000			1 laporan	22,500,000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun		100%	380,000,000			100%	48,095,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 paket	-			1 paket	16,800,000
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	50 orang	380,000,000			50 orang	31,295,000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100%	201,314,136	-	-	100%	161,312,000
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 paket	7,472,000			1 paket	11,300,000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 paket	56,218,500			1 paket	32,300,000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 paket	2,784,000			1 paket	22,500,000
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 paket	12,426,000			1 paket	11,000,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	24 dokumen	2,040,000			24 dokumen	4,212,000
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 laporan	2,310,000			1 laporan	-
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	90 laporan	118,063,636			90 laporan	80,000,000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100%	524,409,800	-	-	100%	178,500,000
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	5unit	313,761,000			5unit	73,000,000
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	5 UNIT	67,390,000			5 UNIT	13,000,000
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	10 unit	113,258,800			10 unit	33,500,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi		0				21,500,000
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1unit	30,000,000			1unit	37,500,000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100%	427,940,000			100%	475,156,500
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 laporan	-			1 laporan	3,000,000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 laporan	274,200,000			1 laporan	309,611,000
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 laporan	64,800,000			1 laporan	75,245,500
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 laporan	88,940,000			1 laporan	87,300,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun		100%	99,000,000	-	-	100%	506,693,002
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1unit	12,000,000			1unit	32,500,000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	4unit	26,000,000			4unit	56,300,000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	15 unit	31,000,000			15 unit	28,300,000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	2 unit	30,000,000			2 unit	389,593,002
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	-			-	-
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	0			-	-
		Cakupan layanan telekomunikasi		95.00%	3,140,007,000	-	-	95.00%	9,536,357,200

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi		80%	873,957,000	-	-	80%	3,700,291,600
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		90%	873,957,000	-	-	90%	3,700,291,600
		Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik		81%				81%	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan		95%				95%	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Laporan	291,221,000			Laporan	1,402,847,000
		Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik		5 media				5 media	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak		50 media				50 media	
		Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah		38 media				38 media	
		Jumlah peserta Bimtek jurnalistik		100 orang				100 orang	
		Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan		3 unit				3 unit	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media		50 laporan				50 laporan	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Jumlah Komunitas Informasi	144,703,000			Jumlah Komunitas Informasi	151,938,000
		Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah		8 kegiatan				8 kegiatan	
		Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat		150 orang				150 orang	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan informasi publik		12 laporan				12 laporan	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Laporan	7,500,000			Laporan	59,220,000
		Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah		2 laporan				2 laporan	
		Jumlah peserta bimtek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		50 orang				50 orang	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Permohonan	63,500,000			Permohonan	250,000,000
		Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		4diseminasi				4diseminasi	
		Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan		4 daftar				4 daftar	
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan		4 daftar				4 daftar	
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD		4 daftar				4 daftar	
		Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD, Kecamatan dan Desa		150 orang				150 orang	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik		4 laporan				4 laporan	
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase	50,000,000			Persentase	116,920,000
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media		10 laporan				10 laporan	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Rekomendasi	49,000,000			Rekomendasi	257,640,000
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		55 aduan				55 aduan	
		Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan		60 orang				60 orang	
		Jumlah peserta admin SP4N-LAPOR!		60 orang				60 orang	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik		2 laporan				2 laporan	
		Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor		1 kali				1 kali	
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase	44,125,000			Persentase	100,000,000
		Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis		120 orang				120 orang	
		Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis		4 media komunikasi				4 media komunikasi	
		Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis		4 laporan				4 laporan	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Media	113,170,000			Media	541,644,600

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		6 komunitas				6 komunitas	
		Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan		5 kali				5 kali	
		Jumlah media komunikasi publik yang dikelola		10 media				10 media	
		Jumlah peralatan studio yang diadakan		4 unit				4 unit	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik		4 laporan				4 laporan	
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	-			Dokumen	23,000,000
		Jumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang terpublikasi		80 agenda				80 agenda	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti		4 laporan				4 laporan	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Konten	20,248,000			Konten	75,999,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		20 konten				20 konten	
		Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		50 orang				50 orang	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		4 laporan				4 laporan	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Orang	90,490,000			Orang	721,083,000
		Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat		35 iklan				35 iklan	
		Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik		100 orang				100 orang	
		Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan		14 unit				14 unit	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik		4 laporan				4 laporan	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan e - government yang terintegrasi		90%	2,266,050,000	-	-	90%	5,836,065,600

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		95%	64,500,000	-	-	95%	350,726,000
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		95%				95%	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	64,500,000			Dokumen	350,726,000.00
		Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah		4 laporan				4 laporan	
		Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100	-			100	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		95%	2,201,550,000	-	-	95%	5,485,339,600
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		95%				95%	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan		95%				95%	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Laporan	100,000,000			Laporan	25,200,000
		Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti							
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)							
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	245,000,000			Dokumen	329,759,000
		Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		7 OPD				7 OPD	
		Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data		7 OPD				7 OPD	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data		5 laporan				5 laporan	
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	100,000,000			Dokumen	116,920,000.00
		Jumlah data yang dapat berbagi pakai		22 jenis data				22 jenis data	
		Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi		4 sistem elektronik				4 sistem elektronik	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan		4 laporan				4 laporan	
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	150,000,000			Dokumen	233,840,000.00
		Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE		3.4				3.4	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government		6 laporan				6 laporan	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Aplikasi	174,650,000			Aplikasi	664,220,000
		Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		13 OPD				13 OPD	
		Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		22 sistem				22 sistem	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik		4 laporan				4 laporan	
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Aplikasi	30,000,000			Aplikasi	331,840,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah aplikasi yang terintegrasi		4 aplikasi				4 aplikasi	
		Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		9 layanan				9 layanan	
		Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan		14 layanan				14 layanan	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan		3 laporan				3 laporan	
2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	-			Dokumen	350,760,000.00
		Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK		14 aspek				14 aspek	
		Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE		6 laporan				6 laporan	
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		unit				unit	255,446,675

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Program	-			Program	204,609,000.00
		Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan		2 capaian				2 capaian	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas		6 laporan				6 laporan	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Perangkat Daerah	1,335,000,000			Perangkat Daerah	#####
		Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah ataumenggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo							
		Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah							
		Besaran bandwidth yang disediakan							
		Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK							
		Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK							

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	66,900,000			Dokumen	339,360,000.00
		Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		25 orang				25 orang	
		Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah		300 orang				300 orang	
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah		300 orang				300 orang	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah		3 laporan				3 laporan	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		Perangkat Daerah	-			Perangkat Daerah	1,000,000,000
		Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah		46 OPD				46 OPD	
		Besaran bandwidth yang disediakan		600 Mbps				600 Mbps	
		Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK		53 kali				53 kali	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK		10 laporan				10 laporan	
2.20.		Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi		90%	141,000,000	-	-	90%	1,084,445,950
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	141,000,000	-	-	100%	683,421,450
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%	260,000,000			100%	401,024,500
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		75%	401,000,000			75%	1,084,445,950
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		75%				75%	
		Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		75%				75%	
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Orang	200,000,000			Orang	156,788,000.00
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase	-			Persentase	203,944,450.00
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Persentase	60,000,000			Persentase	138,871,000.00

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	141,000,000			Dokumen	479,477,000.00
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	Dokumen	-			Dokumen	105,365,500.00
2.21		Indeks KAMI		303	506,700,000	-	-	303	897,187,500
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		90%	506,700,000	-	-	90%	897,187,500
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard		90%	456,700,000	-	-	90%	780,267,500
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 Dokumen	151,700,000			1 Dokumen	100,334,500
		Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2 laporan				2 laporan	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 Laporan	205,000,000			1 Laporan	58,459,500
		Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D		3 orang				3 orang	
		Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerinthan berbasis Eklektronik (SPBE)		3 orang				3 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah		50 orang				50 orang	
		Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2 unit				2 unit	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	322,365,500
		Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal		5				5	

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian		108				108	
		Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		38				38	
		Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah		1 Laporan				1 Laporan	
		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		4 laporan				4 laporan	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	6 OPD	50,000,000			6 OPD	299,108,000
		Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah		1 layanan				1 layanan	
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah		1 CSIRT				1 CSIRT	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan		90%	50,000,000	-	-	90%	116,920,000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	6 OPD	50,000,000			6 OPD	116,920,000
		Jumlah Layanan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 layanan				1 layanan	
		Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4 unit				4 unit	
		Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi		8 unit				8 unit	
					11,812,606,659	-	-	6	18,714,069,372

-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengutamakan pelayanan prima ke masyarakat dan perangkat daerah, prioritas program dan kegiatan didasarkan pada urgensi peruntukannya, sehingga harus ada yang diprioritaskan terlebih dahulu sesuai rencana aksi yang telah disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan sudah tersusun sesuai rencana aksi dan aliran kas sehingga diharapkan apa yang menjadi target indikator kinerja bisa terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dan penyelesaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 - 2026, sehingga apa yang menjadi kekurangan / catatan di tahun 2022 dan 2023 bisa menjadi acuan untuk keberhasilan di tahun 2024.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.


BUPATI NGAWI,
ONYANWAR HARSONO